

UPAYA DIPLOMASI PUBLIK RUSIA TERHADAP INDONESIA DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA

Muhamad Rizky Tafaul Jahidin¹, Mega Nisfa Makhroja², Kurnia Zulhandayani Rizky³

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

²Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

³Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia
rizkytafaul@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to provide an overview of Russia's public diplomacy efforts towards Indonesia in the Russia-Ukraine conflict. After Russia took military action against Ukraine in early 2022, Russia received many negative responses in the form of international sanctions, especially from western countries, these negative responses then increased negative public perceptions of Russia. Based on this, Russia through public diplomacy seeks to provide a counter to these negative perceptions, especially in Asian and African countries which became the focus of Russia's partners during the Russia-Ukraine conflict after being isolated from Western sanctions. To facilitate and maximize the research, the author takes a case study of Russian public diplomacy towards Indonesia in 2022. This research uses Mark Leonard's concept of public diplomacy with its three main strategy dimensions, namely news management, strategic communication, and relationship building in answering all the problem formulations in the research. The research methodology used is qualitative research method, data obtained through analyzing the results of exclusive interviews with the Russian ambassador to Indonesia with mainstream media in Indonesia and by collecting sources such as books, journals, related articles and others related to this research. In this study the author found the fact that Russia's public diplomacy efforts towards Indonesia focus on the role of the Russian Embassy in Indonesia who maximizes the media, both mass media and social media as a tool in facilitating the course of Russia's public diplomacy towards Indonesia.

Keywords: *Russia-Ukraine Conflict, Public Diplomacy, Public Perception, Russian Embassy in Indonesia.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dari upaya diplomasi publik Rusia terhadap Indonesia dalam konflik Rusia-Ukraina. Pasca Rusia melakukan tindakan militer ke Ukraina di awal tahun 2022, Rusia mendapatkan banyak respon negatif berupa sanksi dunia internasional khususnya dari negara-negara barat, respon negatif tersebut kemudian meningkatkan persepsi negatif publik terhadap Rusia. Berdasarkan hal tersebut Rusia melalui diplomasi publik berupaya untuk memberikan konter terhadap persepsi negatif tersebut khususnya di negara-negara Asia dan Afrika yang menjadi fokus mitra Rusia pada masa konflik Rusia-Ukraina setelah terisolasi dari sanksi negara-negara Barat. Untuk mempermudah dan memaksimalkan penelitian tersebut, penulis mengambil studi kasus diplomasi publik Rusia terhadap Indonesia di tahun 2022. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi publik Mark Leonard dengan tiga dimensi strategi utamanya, yaitu news management, strategic communication, dan relationship building dalam menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, data diperoleh melalui analisis hasil wawancara eksklusif duta besar Rusia untuk Indonesia dengan media arus utama di Indonesia dan dengan mengumpulkan sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel terkait dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menemukan fakta bahwa upaya diplomasi publik yang dilakukan Rusia terhadap Indonesia berfokus pada peran Duta Besar Rusia untuk Indonesia yang memaksimalkan media, baik media massa dan media sosial sebagai alat dalam mempermudah jalannya diplomasi publik Rusia terhadap Indonesia.

Kata Kunci: Konflik Rusia-Ukraina, Diplomasi Publik, Persepsi Publik, Duta Besar Rusia untuk Indonesia.

PENDAHULUAN

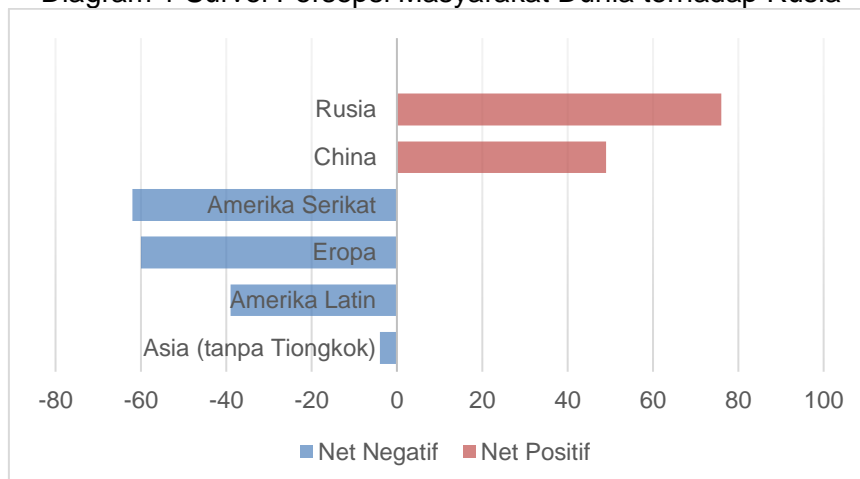
Konflik Rusia dan Ukraina kembali memanas pada awal Februari 2022, dengan menyerang kota-kota besar di Ukraina, termasuk Berdyansk, Chernivhiv, Kharkiv, Odesa, Sumi, dan Ibu kota Kyiv. Konflik Rusia dan Ukraina ini oleh para pejabat barat mengklaim bahwa dapat menjadi konflik terbesar di Eropa sejak tahun 1945 (S. Dian Andryanto, 2022). Pada bulan desember 2021 Rusia melakukan Tindakan dengan mengirim pasukannya ke wilayah perbatasan Ukraina guna mencegah bergabungnya Ukraina ke NATO. Rusia menuntut kepada NATO agar segera menghentikan segala bentuk aktivitasnya di Kawasan Eropa Timur, khususnya di Ukraina, namun tuntutan Rusia tersebut tidak direspon dengan baik sehingga Rusia melakukan aksi militer ke Ukraina yang disebut sebagai Invasi.

Invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina memberikan dampak bagi perekonomian dunia, terganggunya kestabilan politik dunia dan membawa tantangan baru bagi hubungan internasional (Bakrie et al., 2022). Invasi Rusia juga mengakibatkan krisis kemanusiaan. Menurut perkiraan organisasi multilateral Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), setidaknya terdapat 4.149 warga sipil telah tewas dan sebanyak 4.945 terluka di Ukraina sejak dimulainya konflik, dengan jumlah korban yang diyakini jauh lebih tinggi. Menurut International Organization for Migration (IOM) atau Organisasi Internasional untuk Migrasi PBB, menyatakan bahwa satu dari setiap enam orang telah mengungsi karena konflik yang terjadi, sehingga total mencapai 7,7 juta dan lebih dari 6,8 juta orang melarikan diri ke negara lain (Aliyev, 2022).

Akibat dari invasi tersebut, dunia internasional melalui Majelis Umum PBB mendesak Rusia untuk segera menarik seluruh pasukannya dari Ukraina ditengah invasi besar yang dilakukannya. Mayoritas negara anggota PBB mendukung penuh kecaman atas invasi Rusia ke Ukraina yang kemudian disepakati dalam resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 2 Maret 2022. Sebanyak 141 dari total 193 negara anggota PBB mendukung resolusi tersebut, termasuk Indonesia (Indonesia, 2022). Sejumlah sanksi yang diberikan oleh negara-negara dunia dilakukan untuk Rusia mulai dari Uni Eropa yang melarang seluruh perusahaan yang ada diwilayahnya untuk berdagang maupun berinteraksi dengan Rusia. Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan layanan operator seluler dari Rusia. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga melakukan sanksi kepada Rusia berupa pembekuan aset bank terbesar Rusia serta melakukan pemblokiran terhadap perusahaan-perusahaan Rusia yang berbasis di Inggris, begitu juga dengan yang dilakukan negara barat lainnya (Renaldi, 2022).

Besarnya pengaruh dari invasi yang dilakukan Rusia meningkatkan persepsi negatif masyarakat dunia terhadap negara tersebut. Berdasarkan hasil survei dari *Democracy Perception Index*, yang dilakukan selama periode 30 Maret sampai 10 Mei 2022 secara daring yang melibatkan 52.785 responden dari 53 negara dengan ukuran sampelnya sekitar 1.000 responden per negara dan memiliki rata-rata margin kesalahan di semua negara sampel ialah kurang lebih 3,2%.

Diagram 1 Survei Persepsi Masyarakat Dunia terhadap Rusia



Sumber: (Alliance of Democracies, 2022)

Berdasarkan data tersebut, bahwa mayoritas warga dunia memiliki pandangan atau persepsi negatif terhadap Rusia setelah invasi yang dilakukannya ke Ukraina. Persepsi negatif ini terutama berasal dari warga Amerika Serikat (AS) dengan persentase sebesar -62%. Angka minus ini menunjukkan bahwa jumlah proporsi warga dengan persepsi negatif lebih banyak 62% daripada dengan persepsi positif. Kemudian dilanjutkan oleh warga Eropa dengan -60% persepsi negatif. Sementara negara-negara yang berada di kawasan Amerika Latin dengan presentase -39% dan di negara-negara Asia tanpa negara Tiongkok sebesar -4% jauh lebih sedikit. Sedangkan yang memiliki pandangan positif terhadap Rusia ialah dominan berasal dari warga Rusia sendiri, kemudian disusul oleh Tiongkok dengan 49%.

Dengan demikian, publik internasional pada umumnya memiliki persepsi yang negatif terhadap Rusia menurut hasil survey, kemudian sanksi yang diberikan bertujuan untuk mengisolasi Rusia di kancah internasional dengan isu yang berkembang. Setiap negara memiliki isu-isu yang berbeda di negaranya, pada umumnya isu-isu tersebut dapat berpengaruh terhadap hubungan suatu negara dan kerja sama dengan negara lain (Mathematics, 2016). Oleh karena itu, terisolasinya Rusia dalam kancah internasional yang didominasi oleh negara-negara Eropa dan Barat, menjadikan Rusia mencari mitra lain di wilayah Asia dan Afrika untuk memperkuat kerjasama negaranya khususnya pasca tindakan militer yang dilakukannya ke Ukraina.

Selanjutnya berdasarkan laporan survey dari Democracy Perception Index, bahwa di antara 53 negara-negara dunia, hanya 10 negara yang memiliki persepsi positif yaitu (dimulai dari yang terbesar) China, India, Vietnam, Pakistan, Algeria, Indonesia, Saudi Arabia, Malaysia, Mesir, dan Maroko. Hal yang menarik dari laporan ini adalah 10 negara tersebut berada pada wilayah Asia dan Afrika, selaras dengan upaya Rusia untuk mencari mitra kerjasama lain di kawasan Asia dan Afrika. Selanjutnya, Indonesia juga termasuk ke dalam urutan ke 7 dari 10 negara yang memiliki persepsi positif terhadap Rusia. Sedangkan di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang menganut kebijakan politik luar negeri bebas aktif menyikapi konflik ini dengan tidak berpihak kepada siapapun, meskipun Indonesia ikut serta dalam menyetujui resolusi PBB namun bukan berarti Indonesia berpihak ke salah satu negara.

Indonesia memiliki kepentingan fundamental untuk mematuhi norma hukum internasional yang melarang setiap negara menggunakan kekerasan dalam penyelesaian suatu sengketa. Kepentingan Indonesia ini bermuara kepada pemenuhan amanat dari konstitusi "ikut serta dalam ketertiban dunia". Selain itu juga, menurut platform pemantauan dan analisis digital Evello bahwa di media sosial terdapat dominasi keberpihakan dan kekaguman publik Indonesia pada Rusia dan Presiden Vladimir Putin ini tidak searah dengan bagaimana sikap politik pemerintah Indonesia dengan politik bebas aktif.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua anomali dari sikap yang ditunjukkan oleh Indonesia, anomali yang pertama ialah bagaimana Indonesia dengan politik bebas aktif-nya

memiliki pandangan atau persepsi positif dari publik Indonesia yang menunjukkan keberpihakan kepada Rusia, khususnya di saat invasi terjadi. Kemudian yang kedua ialah bagaimana publik Indonesia melihat suatu invasi, masyarakat Indonesia sangat menolak keras atas segala bentuk invasi yang dilakukan suatu negara yang mengganggu ketertiban dan perdamaian dunia, seperti contoh Israel yang melakukan invasi ke jalur Gaza, berdasarkan Survey Saiful Mujani *Research and Consulting (SMRC)* bahwa 71% masyarakat Indonesia menyatakan bahwa Israel bersalah atas Invasi yang dilakukannya terhadap Palestina (Indonesia, 2021). Namun dalam kasus invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, bahwa publik Indonesia memberikan dukungan berupa pandangan yang baik kepada Rusia.

Pembentukan persepsi masyarakat di Indonesia dikarenakan adanya upaya Rusia dalam mendapatkan perhatian dan bahkan dukungan masyarakat internasional melalui diplomasi publik yang dilakukannya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengubah persepsi publik suatu negara. Pada konflik Rusia dan Ukraina yang tidak hanya menggunakan ancaman militer saja melainkan ancaman non-militer dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ditandai oleh gelombang disinformasi yang digencarkan yang mendukung upaya diplomasi publik Rusia, tujuannya bukan untuk merebut wilayah teritorial, melainkan untuk mengambil dan mengamankan pengaruh baik dari dalam negaranya sendiri maupun dunia internasional.

Namun dapat dilihat bahwa Ukraina lebih memenangkan perang informasi di arena global, khususnya pada masyarakat barat yang mengutuk keras serangan Rusia ke Ukraina. Berbeda dengan publik Indonesia yang lebih bersimpati terhadap Rusia. Hal ini terjadi karena bagaimana media berperan besar dalam mendukung upaya diplomasi publik Rusia. Seperti yang dikatakan Chomsky bahwa media dapat dijadikan sebagai alat yang ampuh dalam 'perebutan makna', siapa yang berhasil membangun citra atau image maka akan mendapatkan legitimasi publik seperti yang mereka inginkan, atau sebaliknya (Chomsky, 2021). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk lebih mendalami bagaimana upaya yang dilakukan Rusia dalam merespon citra negatif dunia terhadap Rusia melalui diplomasi publik yang dilakukannya, dan untuk mendalami serta mempermudah penelitian tersebut penulis mengangkat studi kasus di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengkaji penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang memiliki kesamaan bahasan dengan penelitian, baik tulisan dalam bentuk artikel, jurnal, maupun buku. Pada kajian pustaka ini, penulis berupaya untuk melihat posisi penelitian ini secara teoritik maupun empiris dengan penelitian serupa terdahulu. Adapun penelitian yang menjadi pembeda sekaligus pendukung dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertama, tulisan Chandra Purnama, Sasti Khoirunnisa, Anggia Utami Dewi, dan Dina Yulianti dengan judul "*Russia Beyond Indonesia: Upaya Mengubah Citra Melalui Diplomasi Publik*" (Purnama et al., 2020). Penelitian ini membahas tentang upaya Rusia memperbaiki citranya dihadapan publik Indonesia melalui diplomasi publik dengan menganalisis media *Russia Beyond The Headlines Indonesia (RBTHI)*. Pemerintah Rusia menyadari bahwa terlalu banyak kesalahpahaman publik terkait citra dan identitas Rusia yang ada dalam arus informasi global. Oleh karena itu, dengan melawan melalui penyebaran informasi terkait Rusia dari sudut pandang Rusia sendiri diharapkan bisa meminimalisir kesalahpahaman publik terhadap Rusia. Penelitian ini memberikan analisis bahwa ditemukan bentuk upaya diplomasi publik Rusia melalui *RBTHI* melalui tiga bentuk setrategi yaitu *news management*, *strategic communication*, dan *relationship building*. Ketiga strategi ini terus dilakukan Rusia dengan mempublikasikan berita atau informasi-informasi dan artikel yang dicari oleh publik Indonesia, melakukan klarifikasi aktif terkait hoax yang berkaitan dengan Rusia, serta melakukan interaksi yang edukatif melalui platform-platform media sosial. *RBTHI* juga turut menginovasi programnya dengan memaksimalkan media online seperti melalui media-media sosial.

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Chandra Purnama, Sasti Khoirunnisa, Anggia Utami Dewi dan Dina Yulianti tersebut, maka terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian

yang penulis lakukan. Persamaan dari kedua tulisan ini terletak pada bagaimana diplomasi publik berperan dalam upaya memunculkan citra atau persepsi positif terkait Rusia sebagai konter dari munculnya kesan negatif terhadap Rusia dari media-media barat khususnya, kedua tulisan ini juga sama-sama berfokus mengkaji melalui kaca mata diplomasi publik Rusia. Namun adapaun perbedaan dari penelitian antara keduanya dapat dilihat dari perbedaan fokus penelitian. Pada tulisan tersebut berfokus kepada upaya diplomasi publik Rusia melalui media *Russia Beyond* untuk melawan arus informasi global yang lebih berkesan negatif terhadap Rusia. Sedangkan pada penelitian ini, penulis berupaya lebih luas menjangkau upaya diplomasi publik Rusia tidak hanya melalui satu dimensi media, melainkan melibatkan dimensi lain diplomasi publik, dan fokus penelitian ini adalah pasca invasi yang dilakukan Rusia pada awal tahun 2022.

Kedua, tulisan berjudul "*Russian Soft Power in Ukraine: A Structural Perspective*" oleh Ammon Cheskin (Cheskin, 2017). Pada penelitian tersebut, Ammon membahas bagaimana negara-negara di dunia saat ini lebih menggunakan soft power dalam meningkatkan pengaruhnya. Untuk menganalisis *soft power* yang memberikan pengaruh bagi negara lain, Ammon menggunakan pendekatan struktural, Ammon melihat sejauh mana Uni Eropa dalam relasi yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, bahwa Ukraina dari segi emosional lebih terikat kepada Rusia, namun dalam interaksi Ukraina cenderung lebih dekat dengan Uni Eropa, sehingga ini dapat dikatakan bahwa terdapat *struggle identity* di Ukraina. Pada penelitian tersebut, Ammon melakukan kajian kasus aneksasi yang dilakukan Rusia ke Krimea dengan melihat bagaimana posisi tiga aktor yang terlibat yaitu Rusia, Ukraina dan Uni Eropa.

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Ammon Cheskin diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan kedua tulisan ini terletak pada pembahasan *soft power* Rusia di Ukraina untuk mendapatkan pengaruh dari negara lain atas tindakan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Kemudian perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dan kejadian yang dianalisis, pada tulisan Ammon tersebut menggunakan perspektif struktural untuk melihat *soft power* Rusia pada saat aneksasi yang dilakukan Rusia ke Krimea. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menggunakan teori diplomasi publik untuk menganalisis *soft power* Rusia paska invasi yang dilakukan ke Ukraina.

Ketiga, tulisan Fiona Hill dan Angela Stend, yang berjudul "*The World Putin Wants: How Distortion About the Past Feed Delusion About the Future*" (Foreign Affairs, 2022). Pada penelitian tersebut dijelaskan bagaimana dunia yang diinginkan pemerintah Rusia, dalam hal ini Presiden Vladimir Putin di masa depan dan menjelaskan narasi pembenaran dari Rusia sehingga ia melakukan invasi ke Ukraina. Presiden Vladimir Putin bertekad untuk membentuk masa depan agar terlihat seperti masa lalu versinya. Presiden Rusia menginvasi Ukraina bukan karena merasa terancam oleh ekspansi NATO atau oleh "provokasi" barat. Putin memerintahkan "operasi militer khusus" karena dia percaya bahwa itu adalah hak alami Rusia untuk memerintah Ukraina, untuk menghapus identitas nasional negara itu, dan mengintegrasikan rakyatnya ke dalam Rusia Raya.

Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Fiona Hill dan Angela Stend tersebut, maka terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama membahas terkait konter narasi atau persepsi negatif yang muncul terhadap Rusia, kemudian selanjutnya kedua tulisan ini berupaya untuk memberikan tambahan referensi lain dalam melihat invasi Rusia ke Ukraina dari sudut pandang Rusia sendiri. Penelitian ini secara tidak langsung dapat memberikan referensi upaya melawan persepsi negatif terhadap Rusia melalui diplomasi publik. Selanjutnya, yang menjadi perbedaan mendasar disini adalah fokus penelitian, dalam penelitian Fiona Hill dan Angela Stend berfokus pada pembahasan terkait keinginan dan upaya Putin sebagai Presiden Rusia dalam melawan hegemoni barat dalam konflik Rusia dan Ukraina yang terjadi. Berbeda dengan penelitian ini, penulis berfokus pada upaya diplomasi publik Rusia dalam mengonter persepsi negatif yang ada dalam invasi yang dilakukan Rusia yang berfokus di satu negara yaitu Indonesia dengan keunikan yang telah dijelaskan dalam latar belakang sebelumnya.

Keempat, tulisan Vladimir Lebedenko yang berjudul "*On National Identity and the Building of Russia's Image*" (Lebedenko, 2008). Tulisan ini menjelaskan bahwa kondisi dunia yang mengglobal menjadikan citra atau image sebuah negara semakin penting, baik secara

ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Citra bertujuan untuk mendapatkan pandangan yang baik di kalangan internasional, khususnya dalam kerja sama antar negara. Lebedenko menggunakan teori *nation branding* untuk melihat kasus Rusia dalam mengupayakan pembangunan citra yang baik pasca runtuhnya Uni Soviet, Rusia menjadi negara miskin akan citra negaranya.

Berdasarkan tulisan tersebut, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan kedua tulisan ini adalah sama-sama membahas terkait upaya Rusia dalam membangun citra di dunia internasional untuk mendapatkan legitimasi dan pengakuan yang baik dari negara lain. Kemudian yang menjadi perbedaannya adalah Lebedenko menggunakan analisis *nation branding* dalam menjelaskan secara umum upaya pembangunan citra Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet, sedangkan penulis disini menggunakan analisis diplomasi publik dengan berfokus kepada pembangunan image untuk mengonter persepsi negatif terhadap Rusia pasca invasi yang dilakukannya ke Ukraina.

Kelima, tulisan Peter Van Ham yang berjudul "*Power, Public Diplomacy, and The Pax Americana*" (Ham, 2015). Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana Amerika Serikat (AS) menggunakan diplomasi publik dengan *soft power* dalam menunjukkan identitas AS sebagai negara adikuasa. Peter pada tulisannya memberikan salah satu contoh analisis AS dalam peristiwa 11 September (9/11) yang memunculkan narasi "*war on terror*" atau perang melawan teror. *War on terror* menawarkan Washington untuk mengkampanyekan kekuatan liberal. Presiden Bush telah mengindikasikan bahwa teroris ada di mana-mana. Oleh karena itu, *war on terror* AS tidak akan berakhir sampai kelompok teroris dengan jangkauan global ditemukan, dihentikan, dan dikalahkan. Negara mana pun yang terus menyimpan atau mendukung terorisme akan dianggap musuh oleh AS. Narasi *war on terror* ini telah mengambil keuntungan dari peristiwa 9/11 untuk memperluas cakupan jangkauan hegemoni AS dengan menggunakan alasan pembenaran untuk memerangi terorisme internasional dan mendapatkan dukungan dan legitimasi publik.

Berdasarkan literatur yang ditulis oleh Peter tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan kedua tulisan ini adalah sama-sama membahas terkait upaya suatu negara melalui diplomasi publik dalam mengatur dan membangun narasi atau pandangan dunia internasional terhadap suatu negara. Kemudian yang menjadi perbedaannya adalah Peter menggunakan studi kasus Amerika Serikat dengan segala intervensi yang pernah dilakukan terhadap negara timur dan berusaha untuk mendapatkan legitimasi dari publik atas tindakan yang dilakukannya, sedangkan penulis dalam penelitian ini berupaya untuk melihat upaya Rusia dalam menggunakan diplomasi publik untuk melawan persepsi dan narasi negatif dengan menggunakan diplomasi publik. Berdasarkan literatur tersebut, penulis juga dapat belajar terkait pengaplikasian teori khususnya diplomasi publik dalam melihat suatu fenomena internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan ruang lingkup penelitian yang berfokus pada upaya diplomasi publik Rusia di Indonesia pada tahun 2022 tepat di tahun invasi tersebut terjadi. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan majalah, buku, artikel, dan arsip yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat penulis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data primer yang didapatkan dari analisis hasil wawancara Duta Besar Rusia untuk Indonesia dengan media arus utama di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan, teknik ini dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah dalam penelitian ini.

KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk dapat mengkaji bagaimana upaya diplomasi publik Rusia terhadap Indonesia dalam konflik Rusia-Ukraina, penulis menggunakan konsep yang dapat menjelaskan serta

menjabarkan permasalahan berdasarkan topik yang penulis angkat, yaitu konsep diplomasi publik dengan pendekatan realisme.

Jan Mellisen mengartikan diplomasi publik adalah usaha untuk mempengaruhi orang atau organisasi lain mancanegara dengan cara yang positif sehingga dapat mengubah persepsi seseorang terhadap suatu negara (Hennida, n.d.). Kemudian menurut S. Nye, diplomasi publik adalah sebagai sebuah instrumen pemerintah yang dilakukan untuk memobilisasi segala sumber daya yang bertujuan untuk menjalin hubungan dan menarik perhatian masyarakat dunia. Sejalan dengan pendapat Nye, diplomasi publik menurut Mark Leonard dalam bukunya *Public Diplomacy*, adalah tentang membangun suatu hubungan untuk memahami kebutuhan negara, budaya dan masyarakat lainnya, mengoreksi kesalahan persepsi dan mencari tempat dengan kondisi yang sama. Berdasarkan pengertian diatas, dapat diartikan bahwa diplomasi publik berfungsi dalam mempromosikan kepentingan suatu negara melalui penginformasian, pemahaman dan mempengaruhi publik mancanegara.

Merujuk kepada konsep yang dicetuskan oleh Mark Leonard yang menyatakan bahwa terdapat tiga dimensi dalam diplomasi publik yang memainkan peran penting dalam upaya membantu terciptanya daya tarik suatu negara sehingga tujuan dari diplomasi dapat sesuai dengan hasil yang diinginkan. Adapun tiga dimensi tersebut adalah *News Management*, *Strategic Communication*, dan *Relationship Building* (Leonard, 2002).

News Management atau manajemen komunikasi tentang isu yang terus berkembang. Pada tahap dimensi ini negara membangun komunikasi secara rutin dengan memanfaatkan media informasi dan komunikasi yang ada sehingga dapat menjangkau setiap pihak terutama publik asing di luar negeri. *Strategic Communication* atau komunikasi strategis ini pemerintah secara tradisional telah baik dalam mengkomunikasikan pendirian mereka terkait isu-isu, namun kurang efektif dalam mengelola persepsi atas suatu negara secara keseluruhan. *Relationship Building* atau pembangunan hubungan luar negeri jangka panjang, mengembangkan hubungan yang kuat dengan individu-individu melalui seminar, konferensi, beasiswa, dan sebagainya yang dapat membangun jaringan nyata dan virtual serta memberi orang akses ke saluran media. Berbeda dari praktik diplomasi biasa dalam memelihara kontak, karena ini tentang mengembangkan hubungan antar rekan, politisi, penasehat, pembisnis, akademisi dan pengusaha atau budayawan.

Pemisahan diplomasi publik ini adalah terletak pada perbedaan dalam pendekatan teoritis. Pendekatan realisme mendasarkan diplomasi publik pada dua hipotesis, bahwa negara adalah aktor utama dan kekuasaan serta keamanan nasional menjadi perhatian utama negara. Dengan demikian, kaum realis menuntut diplomasi publik yang lebih berpusat kepada negara. Realisme mendefinisikan sistem dunia melalui anarki, tidak adanya kepercayaan, dilema keamanan, dan perang menjadi fokus diplomasi publik yang memastikan publik diplomasi untuk melayani politik kekuasaan dan keamanan nasional (Ayhan, 2019). Oleh karena itu realisme melihat penggunaan dari diplomasi publik terutama dalam bentuk propaganda perang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya konflik antara Rusia dan Ukraina sudah mengakar sejak lama, kedekatan Ukraina serta keinginannya untuk bergabung dengan Uni Eropa dan Aliansi Pertahanan NATO menjadi penyebab tidak harmonisnya hubungan Ukraina dengan Rusia. Keinginan Ukraina untuk bergabung dengan aliansi pertahanan NATO semakin mengganggu Rusia, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh NATO di Eropa Timur semakin meluas dan terus mendekati Rusia yang dinilai oleh Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam eksistensi negaranya. Pada dasarnya, isu serangan oleh Rusia ke Ukraina telah muncul pada akhir tahun 2021, ini dilihat dari citra satelit yang menunjukkan penumpukan baru personel dan peralatan militer Rusia, termasuk tank, artileri dan pengangkut pasukan lapis baja di perbatasan Ukraina. Barat menganggap Rusia memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat militer lainnya, kemudian intelijen barat juga menyebut Rusia akan melakukan penyerangan ke Ukraina (CNBC Indonesia, 2022).

Gambar 1 Citra satelit militer Rusia di perbatasan Ukraina 5 Desember 2021



Sumber: (Epstein & Haltiwanger, 2021)

Pada 21 Februari 2022, Presiden Putin memberi pengumuman mengakui kemerdekaan milisi Donbas, Republik Rakyat Luhansk (LPR) dan Republik Rakyat Donetsk (DPR). Puncaknya pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan perintah untuk melakukan “*special military operation*” atau operasi militer khusus untuk memperkuat wilayah Donbas yang terletak di timur Ukraina. Pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin ini disiarkan di televisi pemerintah sebagai tanda dimulainya operasi militer di wilayah Donbas Ukraina, wilayah yang dikuasai oleh kelompok separatis pro-Moskow. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy merespon dengan mengumumkan darurat militer dan menghimbau kepada para pemimpin dunia untuk menjatuhkan semua kemungkinan sanksi kepada Rusia (Aljazeera, 2022). Tindakan inilah yang kemudian disebut Ukraina dan sebagian besar negara Barat sebagai invasi. AS beserta sekutunya menyebut Rusia telah melanggar kedaulatan Ukraina, sejak peristiwa tersebut narasi-narasi negatif dunia terhadap Rusia meningkat dan berpengaruh terhadap pembentukan persepsi publik internasional terhadap Rusia.

RESPON DAN PERSEPSI NEGATIF DUNIA TERHADAP TINDAKAN RUSIA KE UKRAINA

a. Respon Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Pada 2 Maret 2022 Majelis Umum PBB menghasilkan sebanyak 141 dari 193 suara dari negara anggota yang mendukung Resolusi agar segera mengakhiri operasi militer Rusia di Ukraina dan menegaskan kembali kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah Ukraina. Setelah sidang Umum PBB tersebut, Presiden Majelis Umum PBB Abdulla Shahid mengatakan kepada para wartawan bahwa resolusi tersebut mencerminkan keprihatinan besar masyarakat internasional tentang situasi di Ukraina.

“I join Member States in expressing concern about ‘reports of attacks on civilian facilities such as residences, schools and hospitals, and of civilian casualties, including women, older persons, persons with disabilities, and children’ (United Nations, 2022). Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres juga berbicara kepada wartawan dan menyatakan dia berkewajiban untuk mendukung resolusi tersebut.

“The message of the General Assembly is loud and clear: End hostilities in Ukraine now. Silence the guns now. Open the door to dialogue and diplomacy now” (UN Affairs, 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat bahwa bagaimana pandangan atau persepsi dunia internasional melalui forum utama PBB yang sangat menyayangkan tindakan militer Rusia ke Ukraina yang menyerang fasilitas sipil, seperti tempat tinggal warga sipil, sekolah, sampai rumah sakit yang memakan korban termasuk wanita, penyandang disabilitas dan anak-anak. Oleh karena itu, tindakan militer yang dilakukan Rusia disebut sebagai tindakan yang “melanggar nilai kemanusiaan” dengan turut menargetkan fasilitas sipil Ukraina

b. Respon Amerika Serikat (AS)

Respon negatif dunia terhadap invasi Rusia ke Ukraina dilihat juga dari bagaimana Amerika Serikat, Uni Eropa (UE), dan negara lainnya memberlakukan serangkaian sanksi yang berat ke Rusia dan secara substansial meningkatkan bantuan keamanan, kemanusiaan dan ekonomi ke Ukraina (Massaguni et al., 2022). Amerika Serikat, mulai desember 2021 telah memberikan peringatan kepada Rusia bahwa serangan baru yang akan dilakukan ke Ukraina akan menyebabkan sanksi baru yang lebih berat lagi, hal ini dikatakan karena sebelumnya Amerika Serikat telah memberikan sanksi kepada Rusia sejak tahun 2014. Presiden AS, Joe Biden telah mengeluarkan pernyataan resmi pertamanya pasca Rusia melancarkan aksi militernya ke Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022, Biden mengatakan bahwa Putin telah memilih untuk melakukan perang yang direncanakan dan akan membawa bencana hilangnya nyawa dan penderitaan manusia, oleh karena itu Rusia yang akan bertanggung jawab atas dampak kematian dan kehancuran yang ditimbulkan oleh serangan tersebut. Joe Biden sebelumnya pada 22 Februari 2022 telah memberikan pernyataan sebelum pengumuman special military operation oleh Putin ke Ukraina.

Berdasarkan pernyataan Biden diatas, terdapat beberapa sanksi dan tindakan yang telah diambil oleh The Biden Administration and Congress of US sejak Februari 2022 yang mencakup tindakan dengan menargetkan aset pemerintah Rusia, perdagangan internasional, sektor ekonomi, serta individu dan entitas tertentu Rusia. Berikut sanksi dan tindakan yang dilakukan AS terhadap Rusia (Welt, 2022):

- Pembatasan pada transaksi dengan bank sentral Rusia, membatasi kemampuannya untuk menarik cadangan devisa berdenominasi dolar, serta transaksi dengan Kementerian Keuangan Rusia dan Dana Kekayaan Nasional Rusia.
- Pengawasan ekspor menargetkan sektor pertahanan, kedirgantaraan, dan maritim Rusia; produksi energi dan berbagai operasi komersial dan industry; larangan impor minyak Rusia dan produk energi lainnya ke Amerika Serikat.

Sejak february, Pemerintahan Biden juga telah melarang hal-hal berikut sehubungan dengan Rusia, yaitu :

- Pelarangan investasi baru AS.
- Impor emas AS, berlian, makanan laut, dan minuman beralkohol.
- Ekspor barang mewah AS dan uang kertas berdenominasi dolar.
- Transaksi pasar sekunder oleh Lembaga keuangan AS dalam utang negara Rusia.
- Masuk dan menggunakan wilayah udara, Pelabuhan AS.
- Perdagangan atau investasi AS di wilayah Ukraina timur yang diduduki Rusia.

Pemerintah AS juga menargetkan individu dan entitas Rusia, termasuk dengan pembatasan transaksi dan akses properti yang berbasis di AS. Target sejak bulan Februari 2022 antara lain:

- Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Mikhail Mishustin, anggota Dewan Keamanan Rusia dan Administrasi (termasuk Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Keuangan, serta Kepala Angkatan Bersenjata dan Bank Sentral) dan Gubernur Daerah.
- Legislatif Rusia (Duma Negara dan Dewan Federasi), Komisi Pemilihan Pusat, dan anggota mereka.
- Tujuh bank terbesar Rusia, termasuk dua yang terbesar (Sberbank dan bank VTB) yang menyumbang 80% dari simpanan bank.

Berdasarkan penjelasan di atas, sebelum terjadinya serangan militer Rusia ke Ukraina AS telah memberikan pernyataan berupa peringatan dan ancaman sanksi kepada Rusia agar tidak melanjutkan aksinya di Ukraina, melihat dampak kemanusiaan dan kehancuran yang akan ditimbulkan, namun Rusia tetap melakukan aksinya ke Ukraina. Oleh karena itu, respon yang diberikan Amerika Serikat kepada Rusia tidak hanya berupa pernyataan yang menyayangkan tindakan Rusia tersebut, melainkan juga memberikan sanksi baru yang lebih besar mengingat sebelumnya AS telah memberikan sanksi sejak tahun 2014 kepada Rusia di awal permasalahannya dengan Ukraina.

c. Respon Uni Eropa (UE) Inggris Raya (UK) dan Negara Lainnya

Respon dan persepsi negatif terhadap Rusia juga keras dikeluarkan oleh Uni Eropa (UE), Inggris Raya (UK), negara-negara lain di Eropa (termasuk Norwegia dan Swiss), Kanada, Australia, Selandia Baru, Jepang dan Korea Selatan, telah merespon dengan sanksi atas tindakan militer Rusia ke Ukraina. Banyak dari sanksi yang diberikan identik dengan sanksi yang dilakukan AS. UE dengan dukungan AS melakukan pemblokiran Federasi Rusia dalam system keuangan global *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)* dan layanan perpesanan keuangan khusus lainnya yang akan berhenti melayani 10 lembaga keuangan terkemuka Rusia. Pemblokiran *SWIFT* tersebut membatasi akses Rusia dari pasar keuangan global, sanksi ini dinilai yang terberat dari beragam sanksi ekonomi untuk Rusia (Primadhyta, 2022).

Selain itu, dua hari sebelum serangan Rusia dilakukan ke Ukraina, pemerintah Jerman menanggukkan sertifikasi pipa *Nord Stream 2* yang merupakan proyek penting bagi ekonomi Rusia dan Jerman. Lebih dari 50% gas dan minyak merupakan ekspor dari Rusia. Olaf Scholz, kanselir Jerman dalam konferensi persnya di Berlin, menggambarkan pengakuan Putin atas wilayah yang dikuasai Rusia sebagai “*grave breach* (pelanggaran berat)” hukum internasional yang melanggar perjanjian selama puluhan tahun lalu antara Rusia dan Barat. Pimpinan partai sayap kiri Jerman Die Linke, juga mengeluarkan pernyataan yang mengutuk pengakuan Rusia atas republic yang memproklamirkan diri.

“...*This is certainly not a ‘peace mission’, it violates international and Ukraine’s territorial integrity and heightens the risk of a great war in Europe...*” (Oltermann, 2022).

Berdasarkan pernyataan Die Linke tersebut, narasi yang diberikan kepada Rusia adalah sebagai negara yang melanggar stabilitas perdamaian dan integrasi teritorial internasional dan Ukraina, Rusia juga dapat menjadi pemicu perang besar di Eropa dan tidak menjunjung tindakan misi perdamaian dunia. Kemudian pada 05 Desember 2022, UE telah melarang Sebagian besar impor minyak Rusia. Amerika Serikat telah bergabung dengan UE, Inggris, Kanada, Jepang, dan Australia dalam pengaturan bebas harga global sebesar 60\$ per barel untuk ekspor minyak Rusia dengan melarang warga negara menyediakan layanan transportasi laut untuk transaksi di atas harga tersebut. Sejak Maret 2022, the *US Departments of Justice and the Treasury* bekerjasama dengan Lembaga mitra internasional dalam membentuk satuan tugas Elit Rusia, Proksi, dan Oligarki Rusia untuk penegakan sanksi dan langkah-langkah lainnya.

Berdasarkan pernyataan dan respon negatif dunia diatas yang didominasi oleh negara-negara Barat, tindakan militer yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina merupakan hal yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan (UN Affairs, 2022). Kedaulatan suatu negara dan dampak kemanusiaan oleh perang menjadi alasan utama dunia mengecam tindakan tersebut. Oleh karena itu, dunia internasional khususnya negara-negara Barat memberikan pernyataan dan respon negatif terhadap Rusia yang kemudian menjadi sorotan publik internasional, sehingga secara tidak langsung dapat membentuk persepsi publik atas kasus tersebut.

Sebagai upaya merespon hal tersebut, Rusia kemudian memberikan konter reaksi yang dapat membentuk persepsi positif publik internasional. Salah satu yang dilakukan Rusia adalah dengan memberikan akses informasi seluas-luasnya tentang posisi Rusia dan memberikan pandangan baru terkait konflik yang terjadi di Ukraina, penulis dalam hal ini melihat upaya tersebut melalui instrumen diplomasi publik yang lebih luas dan terbuka. Dibawah ini, penulis akan menjelaskan hasil penelitian tentang bagaimana upaya Rusia melalui diplomasi publik dalam mengonter narasi atau persepsi negatif dunia di Indonesia.

IMPLEMENTASI DIPLOMASI PUBLIK RUSIA DI INDONESIA

Berdasarkan konsep diplomasi publik menurut Mark Leonard, asset soft power: strategic narrative Rusia dalam mengonter persepsi negatif dunia diarahkan pada pelaksanaan atau implementasi dari tiga dimensi strategi diplomasi publik yaitu *news management*, *strategic communication* dan *relationship building*. Ketiga dimensi ini memberikan peranan penting dalam menciptakan daya tarik suatu negara dan masyarakat internasional yang dapat

menciptakan self-images suatu negara dan dapat memobilisasi sikap serta dukungan publik terhadap isu tertentu. Penulis akan menjelaskan temuan tentang bagaimana dimensi ini diaplikasikan sebagai upaya diplomasi Rusia di Indonesia.

1. *News Management*

Penyebaran informasi terkait dengan tindakan Rusia di Ukraina, media memainkan peran penting dalam melaksanakan strategi dimensi diplomasi publik. Media komunikasi dan informasi mudah digunakan sebagai media promosi karena jangkauannya keseluruhan dunia dan dapat diakses oleh siapa saja. Dimensi *news management* ini merupakan strategi diplomasi publik berupa penyampaian isu tentang tindakan militer Rusia ke Ukraina dari sudut pandang Rusia kepada publik domestik dan publik internasional.

Rusia telah memperketat undang-undang terkait dengan media, terutama setelah perang pecah di Ukraina. Peraturan tentang publikasi 'berita palsu' tentang tindakan Rusia ke Ukraina ditekan oleh Putin dan disetujui oleh parlemen pada 4 Maret 2022. Rusia juga melarang penggunaan kata-kata seperti 'perang' dan 'invasi' di media untuk mengatakan tindakan Rusia di Ukraina (Hakim, 2022). Kemudian orang melanggar karena menyebarkan informasi palsu atau informasi yang tidak sesuai atau sejalan dengan kebijakan Rusia dalam perang Ukraina dapat dijatuhi penjara hingga 15 tahun. Kemudian orang melanggar karena menyebarkan informasi palsu atau informasi yang tidak sesuai atau sejalan dengan kebijakan Rusia dalam perang Ukraina dapat dijatuhi penjara hingga 15 tahun (Gazeta, 2022).

Seperti pada penjelasan sebelumnya, salah satu platform media sosial yang digunakan oleh Rusia adalah Facebook (*Russian Embassy in Indonesia*) yang merupakan akun resmi kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia. Penulis memilih menganalisis media sosial facebook tersebut mengingat bahwa, berdasarkan *databoks.katadata.co.id* facebook merupakan platform yang paling sering digunakan oleh pengguna media sosial di Indonesia yang berusia 16 sampai 64 tahun dengan rata-rata waktu yang digunakan masyarakat Indonesia untuk mengakses media sosial selama 3 jam 26 menit, dan total pengguna aktif media sosial sebanyak 160 juta atau sekitar 59% dari jumlah total penduduk Indonesia (databoks, 2020). Pada penelitian ini, penulis menemukan temuan bahwa Facebook *Russian Embassy in Indonesia* pada tahun 2022 (Februari-Desember 2022) sangat intens membagikan informasi tentang krisis yang terjadi di Ukraina dan mempromosikan pandangan Rusia tentang hal tersebut, hal ini dikarenakan krisis di Ukraina kembali menjadi sorotan utama dunia pasca Rusia melakukan operasi militer ke Ukraina yang memberikan dampak meningkatnya persepsi negatif terhadap Rusia.

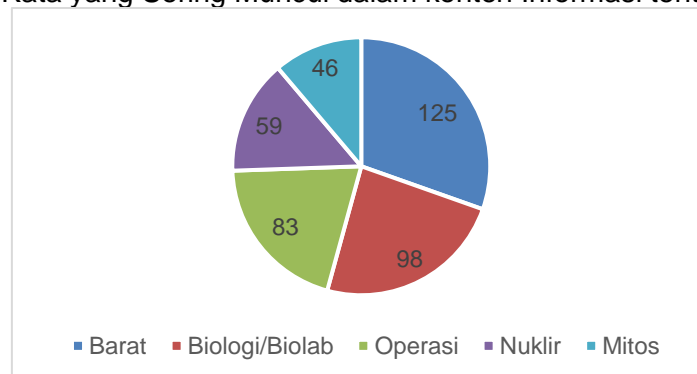
Tabel 1 Jumlah Informasi yang Dibagikan Akun Facebook *Russian Embassy in Indonesia* Pasca Operasi Militer Rusia ke Ukraina pada tahun 2022

| Bulan | Jumlah Konten Informasi tentang Krisis Ukraina | Jumlah Konten Informasi Lainnya | Total Berita/Konten |
|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| 24-28 Februari | 1 | 2 | 3 |
| Maret | 38 | 34 | 72 |
| April | 45 | 31 | 76 |
| Mei | 30 | 24 | 54 |
| Juni | 39 | 36 | 75 |
| Juli | 22 | 41 | 63 |
| Agustus | 24 | 44 | 68 |
| September | 36 | 43 | 79 |
| Oktober | 20 | 29 | 49 |
| November | 17 | 39 | 56 |
| Desember | 30 | 46 | 76 |
| Total | 302 | 369 | 671 |

Sumber: (*The Russian Embassy in Indonesia*, 2022)

Berdasarkan tabel diatas, tercatat bahwa pada 24 Februari sampai Desember 2022, akun Facebook *Russian Embassy in Indonesia* membagikan sebanyak 671 konten informasi atau berita, dengan 302 konten informasi yang berbicara tentang krisis Ukraina dan 369 konten yang berbicara tentang informasi lainnya, hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya masif dalam mempromosikan pandangan Rusia tentang krisis yang terjadi di Ukraina, sehingga Kedutaan Besar Rusia di Indonesia sebagian besar membagikan informasi tentang krisis yang terjadi di Ukraina, yang memberikan dampak bagi pandangan negatif publik domestik maupun internasional terhadap Rusia. Selain itu, pemanfaatan Facebook *Russian Embassy in Indonesia* ini juga dilakukan sebagai konter narasi negatif yang muncul terhadap Rusia dengan harapan mendapatkan perhatian khusus dari publik internasional khususnya di Indonesia.

Diagram 2 Lima Kata yang Sering Muncul dalam konten Informasi tentang Krisis Ukraina



Sumber: (*The Russian Embassy in Indonesia, 2022*)

Berdasarkan data grafik diatas, ditemukan bahwa terdapat lima kata yang sering muncul dalam konten informasi yang berbicara tentang krisis Ukraina, yaitu kata 'barat' diulang sebanyak 125 kali, kata 'biologi/biolab' 98 kali, kata 'operasi' 83 kali, kata 'nuklir' 59 kali dan kata 'mitos' sebanyak 46 kali. Oleh karena itu, dalam upaya mengkonter persepsi negatif publik Internasional, Pemerintah Rusia membagikan informasi yang berkaitan dengan tindakan militer Rusia di Ukraina tahun 2022 dari sudut pandang Rusia sendiri.

a. Narasi 'Barat'

Berdasarkan hal di atas, bahwa kata 'Barat' sebagai salah satu pemberitaan utama Pemerintah Rusia melalui Russian embassy menjelaskan bagaimana 'standar ganda' negara-negara barat dalam melihat perang Rusia di Ukraina menjadi perdebatan dalam media dengan respon publik yang menganggap negara-negara barat sebagai negara yang hipokrit dengan membandingkan knflik yang terjadi di Ukraina dengan Konflik lainnya yang pernah terjadi di dunia seperti konflik yang terjadi di banyak negara Timur Tengah khususnya.

b. Narasi 'Biologi/Biolab'

Penjelasan terkait kata 'biologis/biolab' diatas bahwa tuduhan Rusia tentang adanya aktivitas biologis militer di Ukraina yang didanai AS mendapat respon dari beberapa negara dan organisasi internasional dalam diskusi di Dewan Keamanan PBB. AS dan Ukraina secara tegas membantah tuduhan bahwa AS dan Ukraina sedang mengembangkan senjata biologis di Ukraina dan bahkan mengembalikan tuduhan tersebut ke Rusia. WHO dan PBB juga tidak mengetahui dengan jelas tentang adanya program senjata biologis di Ukraina telah melanggar perjanjian internasional. Disatu sisi wakil menteri luar negeri AS membenarkan adanya laboratorium biologi di Ukraina yang menerima dana dari AS yang ditujukan untuk kepentingan pengawasan penyakit pada hewan dan manusia sebagai sistem peringatan dini untuk penyakit, bukan untuk pembuatan senjata biologis yang dikatakan oleh Rusia, namun kekhawatiran tetap ada

dalam pengembangan laboratorium di Ukraina mengingat kondisi yang sedang terjadi di Ukraina.

Oleh karena itu, penulis mengambil kesimpulan bahwa bukti tentang pengembangan senjata biologis di Ukraina yang didanai oleh AS belumlah kuat, namun fakta terkait pengembangan laboratorium biologis untuk kepentingan kesehatan telah dikonfirmasi oleh WHO, inilah yang juga kemudian di satu sisi menjadi celah bagi Rusia tetap mempertahankan narasi negatif tentang pengembangan 'biolab' di Ukraina.

c. Narasi 'Operasi'

Kata 'operasi' dalam penyebaran informasi terkait perang Rusia di Ukraina adalah merujuk pada istilah '*Special Military Operation* atau Operasi Militer Khusus' sebagai narasi dan kebijakan yang dilakukan Rusia ke Ukraina, kebijakan ini kemudian menjadi konter narasi barat terkait 'invasi' yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Hal ini yang kemudian menjadi tema utama dari sudut pandang Rusia tentang perang yang dilakukannya di Ukraina, Rusia tidak setuju dengan narasi 'invasi' yang dituduhkan Ukraina dan negara-negara Barat untuk Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari mengatakan bahwa kebijakan 'operasi' yang dikatakan Ukraina dan negara barat sebagai 'invasi' adalah tanggapan atas permohonan bantuan dari para pemimpin dua republik Donbas, dia telah melancarkan operasi militer khusus di Ukraina. Putin menekankan bahwa Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina, tujuan utamanya adalah demiliterisasi dan denazifikasi negara tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukan Rusia tidak menyerang kota-kota Ukraina dan senjata pintar digunakan untuk menghilangkan infrastruktur militer (Malgavko, 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas, kata 'operasi' ialah merujuk terhadap kebijakan Rusia tentang 'Operasi Militer Khusus' yang dilakukannya di Ukraina, inilah yang kemudian menjadi konter narasi utama Ukraina dan Barat tentang 'invasi' yang dikatakannya dalam melihat konflik yang terjadi di Ukraina. Kemudian penjelasan terkait Operasi Militer Khusus ini berkaitan juga dengan bagaimana dimensi strategi diplomasi publik selanjutnya, sehingga dalam hal ini penulis akan membahas lebih mendalam terkait 'operasi' yang dilancarkan Rusia di Ukraina pada sub-bab pembahasan selanjutnya.

d. Narasi 'Nuklir'

Kata 'nuklir' dalam penyebaran informasi tersebut digunakan untuk membagikan informasi tentang tuduhan yang ditujukan kepada Rusia tentang rencana penggunaan senjata nuklir di Ukraina, hal ini dapat dilihat dari salah satu informasi yang memuat pernyataan dan opini Juru Bicara Kemenlu Rusia, Maria Zarkharova pada 45 April 2022 tentang "Hoax Perang Nuklir (Rusia)." Kata 'nuklir' yang disebar dalam berita tersebut, menjelaskan tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir oleh Rusia di Ukraina, dengan cara menyinggung kesediaan Rusia untuk menggunakan 'semua cara yang tersedia' untuk mempertahankan wilayah Rusia yang diklaim, hal yang sering dibicarakan oleh Rusia.

Untuk mengonter narasi tentang 'nuklir' Rusia, Putin menyatakan bahwa selama perang dunia II Amerika Serikat dan Inggris secara demonstratif dan tanpa kebutuhan militer menghancurkan banyak kota di Jerman dengan satu-satunya tujuan seperti dalam kasus pengeboman nuklir di Jepang yaitu untuk menakut-nakuti negara Rusia dan seluruh dunia, AS mencoba menggambarkan negara-negara Barat sebagai agresor sejati. Putin tidak secara langsung mengartikulasikan secara terang-terangan mengancam untuk menggunakan senjata nuklir terhadap Ukraina jika serangan balasan Ukraina terus berlanjut (Clark et al., 2022).

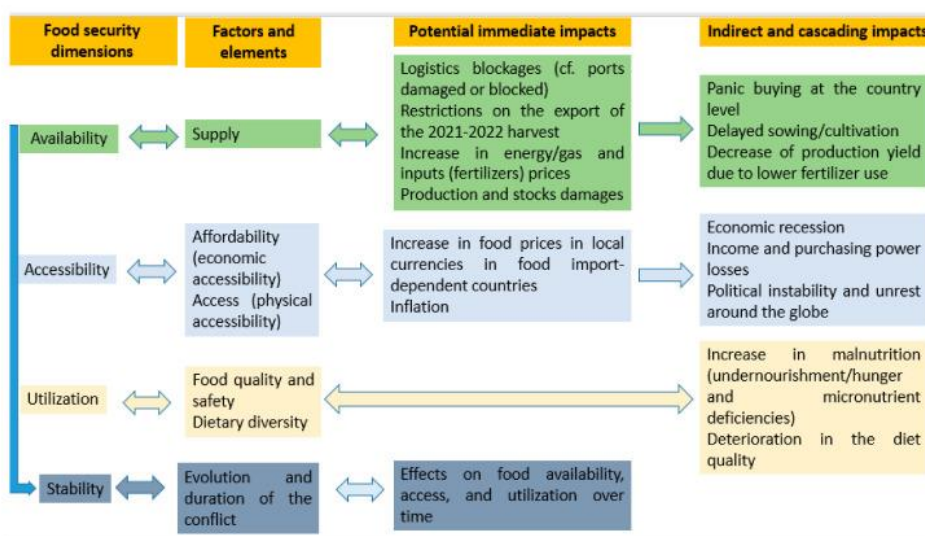
Berdasarkan pengamatan penulis, berdasarkan data-data yang ditemukan bahwa sulit untuk menilai indikator-indikator apa saja yang akan digunakan oleh Putin untuk mengevaluasi kesuksesan dari kedua upaya tersebut, namun keduanya akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai hasil yang baik atau terbukti gagal, waktu yang mungkin akan dibutuhkan Putin sebelum mempertimbangkan eskalasi nuklir. Melihat hal tersebut penggunaan nuklir oleh Rusia tidak akan mencapai efek yang

menentukan bagi Rusia melainkan akan menarik intervensi militer konvensional Barat secara langsung dalam konflik di Ukraina, sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa semakin kecil kemungkinan dalam konflik Rusia-Ukraina untuk melakukan serangan nuklir.

e. Narasi 'Mitos'

Kemudian yang kelima adalah kata "Mitos" digunakan dalam mengkonter narasi dan pernyataan dari Uni Eropa, salah satunya terkait alasan krisis pangan dan energi global yang diakibatkan oleh tindakan Rusia ke Ukraina. Informasi yang menjelaskan terkait perang Rusia-Ukraina memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung serta jangka panjang terhadap ketahanan pangan global dapat dilihat berdasarkan gambar berikut (Tarek Ben Hassen, 2022):

Bagan 1 Dampak Perang Rusia-Ukraina terhadap Ketahanan Pangan Global



Sumber: (Tarek Ben Hassen, 2022)

Berdasarkan penjelasan diatas yang menunjukkan bahwa perang yang dilakukan Rusia ke Ukraina memberikan dampak terhadap krisis pangan dan Energi. Melalui akun media Russian Embassy, Rusia mengonter dengan membuat konten "Membongkar Mitos-mitos Uni Eropa terkait Alasan Krisis Pangan dan Energi", ini menjadi salah satu konten informasi yang sering dibagikan, salah satunya pada 23 September 2022 Russian Embassy membagikan informasi bahwa terdapat mitos dalam penyebaran informasi terkait krisis pangan dan energi yang diakibatkan oleh perang Rusia di Ukraina.

Berdasarkan penjelasan tersebut, upaya diplomasi publik Rusia dilakukan melalui dimensi atau strategi news management dengan memanfaatkan akun media sosial Facebook resmi Kedutaan Besar Rusia di Indonesia (Russian Embassy in Indonesia) masif dilakukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkampanyekan informasi terkait krisis yang terjadi di Ukraina dari sudut pandang Rusia sendiri, dan sebagai upaya untuk memberikan informasi kontra dari informasi negatif tentang perang yang dilakukan Rusia ke Ukraina, sehingga diharapkan dapat mampu mempengaruhi pembentukan persepsi publik di Indonesia.

2. Strategic Communication

Dimensi *strategic communication* atau komunikasi strategi merupakan strategi dengan mengembangkan tema yang ingin diperkenalkan oleh suatu negara dengan memperkuat inti pesan atau narasi sehingga dapat mempengaruhi pandangan publik sebagai pesan. Dimensi

ini menekankan kepada pentingnya konsolidasi dalam pihak Rusia yang terlibat dalam membagikan informasi tentang krisis Ukraina untuk saling bekerjasama dalam mempromosikan tema pesan atau narasi yang sama, yaitu '*Special Military Operation*'. Pesan inilah yang digunakan Rusia dalam mengonter persepsi publik yang dipengaruhi oleh persepsi negara-negara Barat dan Ukraina tentang narasi 'Invasi' kejam yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina.

Berdasarkan diagram 2 pada dimensi *news management* diatas, penulis menemukan bahwa kata 'operasi' merupakan lima kata yang sering diulang dalam informasi yang dibagikan melalui akun media sosial resmi Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia, di satu sisi tidak ditemukan satupun hasil yang menunjukkan penggunaan kata 'invasi' dalam penyebaran informasi tentang krisis yang terjadi di Ukraina ditahun 2022. Ini menunjukkan bahwa kata 'invasi' yang diberikan Barat dan Ukraina kepada Rusia tidak diterima oleh Rusia dan memilih menggunakan istilah *special military operation* atau operasi militer khusus.

Istilah *Special Military Operation*, didefinisikan pertama kali oleh mantan Kolonel Militer Rusia, Vladimir Kvachov yang diterbitkan dalam surat terbuka kepada Staf Umum Rusia dan komando operasi khusus. Surat tersebut berfokus untuk membenarkan tindakan yang dilakukan Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 dan lebih ditunjukkan untuk mempengaruhi penduduk sipil Rusia (Bartles, 2022). Pemahaman Kvachkov tentang 'operasi militer khusus' adalah berbeda dari operasi senjata gabungan lainnya karena cara yang lebih langsung untuk mencapai tujuan politik-militer, tanpa menggunakan operasi strategis pada tingkat tertinggi komitmen negara. Kvachov memahami 'operasi militer khusus' yang diterapkan pada invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 sebagai operasi senjata gabungan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan militer-politik yaitu 'demiliterisasi dan denazifikasi' dengan cepat.

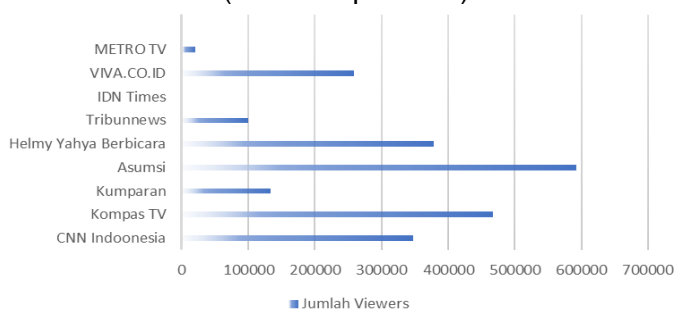
Berdasarkan penjelasan di atas, narasi *Special Military Operation* yang digunakan Rusia dalam tindakan militernya ke Ukraina digunakan sebagai fokus tema utama dalam mengonter narasi 'invasi' oleh Ukraina dan Negara-negara Barat dalam melihat tindakan militer yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Oleh karena itu, narasi 'operasi militer' atau 'invasi' akan dapat menunjukkan bagaimana posisi suatu negara dalam melihat perang di Ukraina. Jika disebut sebagai 'invasi', maka negara tersebut mendukung Ukraina dan negara-negara Barat. Sebaliknya, jika dikatakan sebagai 'operasi militer', maka negara tersebut mendukung Rusia.

3. Relationship Building

a. Wawancara Eksklusif dengan Dubes Rusia Lyudmilla Vorobieva

Setelah dilakukannya tindakan militer oleh Rusia ke Ukraina, berbagai macam persepsi dan pertanyaan muncul dari publik internasional terkait permasalahan tersebut. Di Indonesia, untuk menjawab dan memberikan persepsi baru tentang yang terjadi di Ukraina, pemerintah Rusia melalui duta besarnya untuk Indonesia, Lyudmilla Vorovieca intens melakukan wawancara eksklusif di media arus utama Indonesia dengan tujuan untuk memberikan pandangan atau persepsi dari sudut pandang Rusia sendiri, sehingga dapat mempengaruhi pembentukan persepsi publik di Indonesia dalam melihat permasalahan tersebut.

Diagram 3 Wawancara Eksklusif Dubes Rusia dengan Media Arus Utama Indonesia (Maret-September)



Sumber: (Youtube, 2022)

Gambar diatas merupakan diagram data terkait media arus utama Indonesia yang melakukan wawancara eksklusif bersama Dubes Rusia untuk Indonesia, Lyudmilla Vorovieca beserta jumlah viewersnya dari bulan Maret sampai September. Wawancara eksklusif ini membahas tentang krisis yang terjadi di Ukraina akibat tindakan militer yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Gambar diagram tersebut menjelaskan bahwa, akun youtube 'Asumsi' memiliki jumlah viewers atau penonton terbanyak daripada akun youtube lainnya, yaitu sekitar 593.000 viewers (Asumsi, 2022). Berdasarkan hal tersebut, penulis mengkaji konten wawancara eksklusif yang dilakukan melalui akun youtube 'Asumsi' tentang bahasan dan narasi yang disampaikan Pemerintah Rusia dalam hal ini melalui Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva sebagai upaya mengonter informasi dan narasi negatif Barat terhadap Rusia.

b. *The Valdai Discussion Club*

The Valdai Discussion Club atau Klub Diskusi Valdai didirikan pada tahun 2004. Namanya diambil dari Danau Valdai yang terletak di dekat Veliky Novgorod, tempat pertemuan pertama klub berlangsung. Intelektualitas Klub ini sangat dihormati baik di Rusia maupun di luar negeri. Lebih dari 1.000 perwakilan komunitas ilmiah internasional dari 85 negara telah ambil bagian dalam kegiatan Klub. Mereka termasuk profesor dari universitas besar dunia dan think tank, termasuk Harvard, Columbia, Georgetown, Stanford, Universitas Carleton, Universitas London, Universitas Kairo, Universitas Teheran, Universitas Cina Timur, Universitas Tokyo, Universitas Tel Aviv, Universitas Universitas Messina, Universitas Johns Hopkins, Sekolah Ekonomi London, King's College London, Sciences Po dan Sorbonne (*Valdai Club Foundation*, 2023).

Terkait permasalahan yang terjadi di Ukraina, penulis tidak menemukan literatur yang menjelaskan secara langsung bahwa adanya forum diskusi internasional Valdai Discussion Club ini dijadikan sebagai forum untuk mempengaruhi persepsi positif internasional terhadap Rusia. Namun penulis menganalisis bahwa melalui tema-tema yang dibahas dalam forum tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi pembentukan persepsi publik internasional terhadap Rusia, khususnya dalam permasalahan di Ukraina.

Pada saat diselenggarakannya Valdai Discussion Club yang ke 19 pada 27 Oktober 2022 di Moskow dengan tema forum yang diangkat pada tahun 2022, yaitu *A Post-Hegemonic World: Justice and Security for Everyone*. Pertemuan ini dihadiri oleh 111 pakar, politisi, diplomat, dan ekonom dari 41 negara, termasuk Indonesia. Pada pidato sambutannya, Putin menyampaikan tentang platform *valdai discussion club* digunakan untuk membahas lebih dari sekali, perubahan besar dan serius yang telah terjadi dan sedang terjadi di seluruh dunia, risiko yang ditimbulkan oleh degradasi institusi global, erosi prinsip keamanan kolektif dan substitusi dari "aturan" untuk hukum internasional. Pada sambutannya tersebut, Putin menjelaskan tentang sistem 'Barat' yang ter-hegemoni saat ini di dunia internasional. Ia menyampaikan bahwa Barat telah mengambil sejumlah langkah dalam beberapa tahun terakhir terutama dalam beberapa bulan terakhir, dirancang untuk meningkatkan situasi.

Berdasarkan pidato sambutan Putin di forum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin menjadikan forum Valdai Discussion Club tersebut sebagai forum terbuka untuk membahas krisis sistem internasional yang terjadi atau seperti yang Putin katakan sebagai 'krisis doktrinal' tatanan internasional gaya Amerika Serikat. Putin berusaha memberikan pandangan baru tentang sistem global saat ini. Oleh karena itu, melalui forum diskusi internasional tersebut Rusia memberikan perspektif baru dalam melihat tatanan dunia saat ini yang dikatan Putin sebagai 'hegemoni Barat', dan dengan

kehadiran peserta intelektual dari berbagai negara, makan secara tidak langsung dapat menyebarkan gagasan-gagasan yang lahir dari forum tersebut ke masing-masing negara yang menghadiri.

c. Upaya lainnya dalam Relationship Building Rusia di Indonesia

- Melakukan Kunjungan dan Silaturahmi dengan Organisasi Masyarakat di Indonesia. Pada 8 Maret 2022 Dubes Rusia berkunjung ke Kantor Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) di Jakarta. Dalam kunjungan tersebut Dubes Rusia disambut langsung oleh Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf dan membahas isu keamanan global. Kemudian pada 26 Juli 2022, Dubes Rusia menghadiri acara milad MUI ke-47. Dubes Rusia mengharapkan interkoneksi Umat Islam Indonesia dan Umat Islam Rusia semakin kuat dan erat. Pada 12 Desember 2022, Dubes Rusia juga menghadiri acara Ijma Ulama Wisuda Pendidikan Kader Ulama (PKU) Angkatan XVI di Kabupaten Bogor.
- Menghadiri Kegiatan Kampus di Indonesia. Pada 24 September 2022 Dubes Rusia menghadiri acara International Culture Fest 2022 di Universitas Indonesia, dan berpidato tentang perkembangan hubungan Rusia-Indonesia di bidang budaya.
- Membuka Beasiswa Rusia 2023/2024 untuk Putra Putri Indonesia Jenjang S1, S2 dan S3.
- Menjalin Hubungan dengan Media di Indonesia. Pada 20 April 2022 mengadakan acara buka puasa bersama awak media massa Indonesia, lebih dari 50 wartawan hadir pada acara tersebut. Kemudian pada ada 19 Oktober 2022 Dubes Rusia bertemu dengan delegasi Media Group Network yang dipimpin oleh Presiden Metro TV bapak Don Bosco Selamun. Pertemuan tersebut membicarakan prospek kerjasama di antara media Rusia dan Indonesia.

Upaya lain dalam relationship building diatas merupakan beberapa contoh Rusia dalam mengikutsertakan publik Indonesia dalam memahami Rusia sendiri dengan harapan dapat menumbuhkan kedekatan emosional dan pandangan yang baik terhadap Rusia. Mulai dari bersilaturahmi dengan organisasi masyarakat di Indonesia, menghadiri kegiatan kampus, memberikan beasiswa pendidikan, melakukan pendekatan dengan media, sampai dengan menghadiri kegiatan olahraga di Indonesia menunjukkan upaya lainnya dalam dimensi strategi relationship building dalam diplomasi publik Rusia di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan Rusia ke Ukraina pada 24 Februari dengan cepat memunculkan respon dunia internasional mulai dari PBB, UE, AS, Inggris Raya dan negara lainnya di Eropa, hal tersebut dikatakan sebagai tindakan yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan, sehingga respon yang diberikannya bukan hanya berupa kecaman melainkan juga berupa sanksi kepada Rusia yang kemudian menjadi sorotan publik internasional. Banyaknya respon negatif internasional dan tingginya perhatian publik terhadap permasalahan Rusia-Ukraina, secara tidak langsung dapat membentuk persepsi publik terhadap kasus tersebut. Oleh karena itu, Rusia melakukan konter atas persepsi negatif yang ada melalui upaya diplomasi publik yang dilakukan. Hal ini dimplementasikan dalam tiga dimensi strategi diplomasi publik yaitu news management, strategic communication dan relationship building.

Pada dimensi strategi news management ini pemerintah Rusia dalam diplomasi publik melalui Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia memanfaatkan akun media sosial untuk menyebarkan dan megkampanyekan informasi dan narasi yang berkaitan dengan konflik Rusia-Ukraina dari kacamata Rusia sebagai konter atas berita dan persepsi negatif yang ada. Melalui akun media sosial (facebook) periode 24 Februari sampai Desember 2022, Rusia menyebarkan 302 dari 671 berita informasi yang menjelaskan tentang konflik Rusia-Ukraina,

dan dalam berita tersebut terdapat lima kata yang sering diberitakan atau muncul yaitu; Barat; Biologi/biolab; Operasi; Nuklir; dan Mitos. Melalui lima kata tersebut, pemerintah Rusia melakukan konter informasi atau narasi dari arus media utama yang condong negatif.

Pada dimensi strategic communication pemerintah Rusia dalam penyebaran informasinya menggunakan narasi 'Special Military Operation' yang digunakan sebagai fokus utama dalam mengonter narasi informasi 'invasi' oleh Ukraina dan Negara-negara Barat yang buruk terhadap pembentukan persepsi terhadap Rusia. Melalui narasi tersebut pemerintah Rusia memberikan pandangan dan informasi kepada dunia internasional khususnya di Indonesia tentang upaya memberikan pembenaran atas tindakan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina.

Dimensi strategi diplomasi publik yang terakhir relationship building, pemerintah Rusia melakukan upaya dalam mengonter persepsi negatif di Indonesia dilakukan dengan tingginya intensitas Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmilla Vorobieva dalam melakukan wawancara eksklusif dengan para jurnalis arus media utama di Indonesia yang membicarakan tentang konflik yang terjadi di Ukraina dari kacamata Rusia. Kemudian dalam lingkup global, pemerintah Rusia melalui forum the valdai discussion club yang digunakan sebagai dialog antar elit intelektual global tentang krisis sistem internasional termasuk permasalahan yang terjadi di Ukraina yang secara tidak langsung dapat membentuk persepsi positif publik internasional terhadap Rusia.

REFERENCES

- Aliyev, J. (2022). *Perang Rusia-Ukraina lewati hari ke-100*. Aa.Com.Tr. <https://www.aa.com>
- Aljazeera. (2022). *Russian forces launch full-scale invasion of Ukraine*. Aljazeera.Com. <https://www.aljazeera.com>
- Alliance of Democracies. (2022). *Democracy Perception Index 2022*. *Latana*, 50. <https://latana.com/democracy-perception-index/>
- Asumsi. (2022). *Dubes Rusia Bicara, Dunia Bukan Hanya Amerika dan Uni Eropa - Pangeran*. www.youtube.com. <https://www.youtube.com/watch?v=gOS0xH4rjsg>
- Ayhan, K. J. (2019). The boundaries of public diplomacy and nonstate actors: A taxonomy of perspectives. *International Studies Perspectives*, 20(1), 63–83. <https://doi.org/10.1093/isp/eky010>
- Bakrie, C. R., Delanova, M. O., & Yani, Y. M. (2022). Perekonomian Negara Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Caraka Prabhu*, 6(1), 65–86.
- Bartles, R. N. M. & C. K. (2022). *Defining the "Special Military Operation."* <https://www.ndc.nato.int/>. <https://www.ndc.nato.int/>
- Cheskin, A. (2017). Russian soft power in Ukraine: A structural perspective. *Communist and Post-Communist Studies*, 50(4), 6. <https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2017.09.001>
- Chomsky, N. (2021). *Politik Kuasa Media* (A. B. K. Aan Mansyur (ed.); 5th ed.). Jalan Baru Publisher.
- Clark, M., Lawlor, K., & Stepanenko, K. (2022). Assessing Putin 's Implicit Nuclear Threats After Annexation. In *ISW Institute For the Study of War*. <https://www.understandingwar.org/backgrounders/special-report-assessing-putin's-implicit-nuclear-threats-after-annexation>

- CNBC Indonesia. (2022). *Citra Satelit, Potret Penumpukan Militer Rusia Dekat Ukraina*. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com>
- databoks. (2020). *10 Media Sosial yang Paling Sering Digunakan di Indonesia*. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/>. <https://databoks.katadata.co.id>
- Epstein, J., & Haltiwanger, J. (2021). *New satellite images show the Russian military's alarming buildup along the Ukrainian border*. Businessinsider.Com. <https://www.businessinsider.com>
- Foreign Affairs. (2022). Foreign Affairs The Centennial Issue. *The Regency of Tunis, 1535–1666*, 112.
- Gazeta, N. (2022). *Russia's parliament approves jail for 'fake' war reports*. [Www.Aljazeera.Com. https://www.aljazeera.com/news/2022/3/4/russia-prison-media-law-fake-reports-ukraine-war](https://www.aljazeera.com/news/2022/3/4/russia-prison-media-law-fake-reports-ukraine-war)
- Hakim, I. A. (2022). *Peraturan Baru Diteken Putin, Sebarkan Berita Palsu tentang Invasi Rusia Bisa Dihukum 15 Tahun*. Kompas.Tv. <https://www.kompas.tv/article/267544/peraturan-baru-diteken-putin-sebarkan-berita-palsu-tentang-invasi-rusia-bisa-dihukum-15-tahun>
- Ham, P. van. (2015). Power, Public Diplomacy, and the Pax Americana. In J. Melissen (Ed.), *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations* (1st ed., pp. 47–63). PALGRAVE MACMILLAN.
- Hennida, C. (n.d.). Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri. *Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya*.
- Indonesia, C. (2021). *Survei SMRC: 71 Persen Warga RI Sebut Israel Bersalah*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com>
- Indonesia, C. (2022). *Majelis Umum PBB Desak Rusia Segera Angkat Kaki dari Ukraina*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com>
- Lebedenko, V. (2008). On national identity and the building of Russia's image. In K. Dinnie (Ed.), *Nation Branding: Concept, Issues, Practice* (1st ed., pp. 105–126). Butterworth Heinemann.
- Leonard, M. (2002). *Public Diplomacy* (R. Fisher (ed.)). The Foreign Policy Centre.
- Malgavko, S. (2022). *Russia's special operation is not aimed at ruining Ukraine's statehood — Foreign Ministry*. TASS. <https://tass.com/politics/1423509>
- Massaguni, M., Nasir Badu, M., & Sallatu, M. A. (2022). Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(1), 2775–3336.
- Mathematics, A. (2016). *Diplomasi Publik*. 1–23.
- Oltermann, P. (2022). *Germany halts Nord Stream 2 approval over Russian recognition of Ukraine 'republics'*. The Guardian. <https://www.theguardian.com>

- Primadhyta, S. (2022). *Mengenal SWIFT, Sanksi Ekonomi Terberat yang Dihadapi Rusia*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com>
- Purnama, C., Khoirunnisa, S., Dewi, A. U., & Yulianti, D. (2020). Russia Beyond Indonesia: Image Transforming Effort Through Public Diplomacy. *Jurnal Global & Strategis*, 14(1), 121. <https://doi.org/10.20473/jgs.14.1.2020.109-124>
- Renaldi, T. (2022). *Sanksi yang Dijatuhkan kepada Rusia atas Invasi Ukraina, Apa Saj* *Artikel ini telah tayang di dengan judul*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com>
- S. Dian Andryanto. (2022). *Sebulan Rusia Serang Ukraina, Begini Kronologis Sejak 24 Februari 2022*. Tempo.Co. <https://dunia.tempo.co>
- Tarek Ben Hassen, and H. E. B. (2022). Impacts of the Russia-Ukraine War on Global Food Security: Towards More Sustainable and Resilient Food Systems? *PubMed Central*, 11(15). <https://doi.org/10.3390/foods11152301>
- The Russian Embassy in Indonesia. (2022). *Russian Embassy in Indonesia*. Facebook: Russian Embassy in Indonesia. <https://web.facebook.com>
- UN Affairs. (2022). *UN General Assembly votes to suspend Russia from the Human Rights Council*. <https://news.un.org>
- United Nations. (2022). *General Assembly resolution demands end to Russian offensive in Ukraine*. News.Un.Org. <https://news.un.org>
- Valdai Club Foundation. (2023). *About Valdai Club Foundation*. Valdaiclub.Com. <https://valdaiclub.com/about/valdai/>
- Welt, C. (2022). Russia ' s War Against Ukraine : Overview of U . S . Sanctions and Other Responses. *Congressional Research Service*. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN11869>
- Youtube. (2022). *Youtube*. Youtube.Com. <https://www.youtube.com/>